

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abuyamin, Oyok. *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Bandung: Abas Z & Sumarni Publishing, 2012.
- Algra, dkk. *Mula Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Algra, dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Ali, Chidir. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT.Eresco, 1993.
- Alijoyo, Antonius. Subarto Zaini, et.al., *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan* (Jakarta: PT Indeks, 2004).
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: GI, 2002.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978.
- Charlesworth. Morse. *Company Law*. ELBS: Fourteenth Edition, 1991.
- Bernes, A. James cs. *Law for Business*. Irwin:Fourth Edition, 1991.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PTEResco, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1989.

- Farouq. *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan Perpajakan*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PTCitra Aditya Bakti, 2010.
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik : Edisi revisi disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 1998.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017.
- Hamilton, Robert W. *The Law of Corporation*. St.Paul Minn: West Publishing Co, 1996.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE, 2003.
- Horn, Norbet. et.al., ed, *German Private and Commercial Law: An Interduction*. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Huizink, J.B. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2004.
- Kadir, Abdul. *Pemrograman Android dan Database*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1985.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: FH UI, 2015.
- Kusumatmaja. Mochtar. B.Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Penegrtian Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Kelly, David. et.al., *Business Law*. (London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: FEUI, 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2009.

- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Notohamidjojo. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Salatiga: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971.
- Pandiangan, Liberty. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2000.
- Rajagukguk, Erman. *Filsafat Hukum Ekonomi*. Jakarta: Bahan Kuliah, Tt.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sari, Diana. *Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sastrawidjaja, Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT.Alumni, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi: Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soejono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Rochmat. *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: PTEResco, 1976.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Pajak Internasional Indonesia*. Bandung: PTEResco, 1977.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PTEResco, 1979.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PTEResco, 1990.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PTEResco, 1990.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung: PTEResco, 1991.
- Soemitro, Rochmat. *Asas-Asas Hukum Perpajakan*. Bandung: PTEResco, 1991.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PTEResco, 1992.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Simanjuntak, Ricardo. *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie (ed.), Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

- Sinaga, Syamsudin Manan. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PTTatanusa, 2012.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, & Herni Sri Nurhayati. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.
- Tumbuan, Fred B.G. “*Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/98,*” dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), *Hukum Kepailitan:Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perserusahaan Peseroan Terbatas*. Bandung: P.T.Alumni, 2004.
- Vermulen, Erik P.M. *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and The United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*. Deventer: Kluwer Law Internasional, 2002.
- Waluyo. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Wilamarta, Mishardi. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002),
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zimmer, Daniel. *Legal Personality, dalam Ella Gepken Jager, et.al.,eds, VOC 1602-2002:400 Years of Company Law*. Deventer: Kluwer Legal Publisher, 2005.

B. KARYA TERJEMAHAN

Hart, H.L.A. *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, terjemahan oleh M Khosim. (Bandung: Nusa Media, 2010), 246.

Lebacqz, Karen. *Six Theorie of Justice (Teori-Teori Keadilan)*. terjemah Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media, 2011.

C. ARTIKEL DAN JURNAL

Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3 (Desember 2014): 5.

Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawa, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (September 2012): 5.

Bank Indonesia. Penerapan Z-score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia (Merosotnya nilai tukar sempat

mencapai titik terburuk sekitar Rp. 17.000 untuk setiap US Dollarnya).

Jakarta:Bank Indonesia, 1999.

Amandemen Faillissement Verordening merupakan salah satu butir dalam Letter of Intent and Memorandum of Economic and Financial Policies by the Indonesia Government dated July 29, 1998.

D. DISERTASI ATAU SKRIPSI

Geme, Maria Theresia, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Nagada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2012.

Santoso, Rachmat. “Analisis Yuridis Kepailitan BUMN Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Kasus PTDirgantara Indonesia (Persero),” Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sahid Jakarta, 2008.

E. AKTA-AKTA

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muara Manggalindo Nomor 75 Tanggal 6 April 1990 yang dibuat dihadapan Yudo Parupurno, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-5494.HT 01.01.TH 91 tertanggal 07 Oktober 1991, yang telah melakukan perubahan dengan Akta Nomor 24 tertanggal 17 Oktober 2008,

Akta Nomor 29 tanggal 30 Juli 2009 dan Akta Nomor 07 tertanggal 12 September 2013, yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Akta Berita Acara Pemegang/ Pemilik Saham PT Muara Manggalindo Nomor 62 Tanggal 31 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Sri Puspitaningtyas, Sarjana Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Desember 1996 Nomor 31/P.C.N/1996.PN.Sby, Pengganti Wachid Hasyim, Sarjana Hukum Notaris di Surabaya.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 Tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 Tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Muara Manggalindo Nomor 21 Tanggal 23 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Muara Manggalindo Nomor 24 Tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 Tanggal 12 September 2013 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.

Akta Pernyataan Keputusan Kurator Nomor Nomor 8 tertanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Eva Kurnianingsih, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Lebak.

Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT Muara Manggalindo Nomor 20 Tanggal 20 Juli 2018 2017 yang dibuat dihadapan Eva Kurnianingsih, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Lebak.

F. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 17 Maret 2011;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 295/K/Pdt.Sus/2011 tanggal 8 Desember 2011;

Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 01 Juni 2011;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 471/K/Pdt.Sus/2011 tanggal 3 Oktober 2011;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 16 Juli 2012;

Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Februari 2013;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pdt-Sus-Pailit/2013 tanggal 18 April 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt. Sus-Pailit/ 2014 tanggal 28 November 2014.

Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Agustus 2017.

Putusan Pengadilan Pajak No. 117428.99/2017/PP/MXIIA Tahun 2019. Tanggal 18 Februari 2019.

G. MAKALAH YANG DIBAWAKAN DI PERTEMUAN ILMIAH

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” Makalah yang dibawakan pada Seminar Nasional bertema Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, Jakarta, September 2006.

H. SURAT-SURAT

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Surat kepada Pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk., 2017.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Surat kepada Sherly Agustine Nugroho, 22 Juni 2017.

PT Bank Central Asia Tbk., Kantor Cabang Pembantu Cengkeh Jakarta Barat, surat kepada Sherly Agustine Nugroho, tanpa tanggal.

PT Bank Central Asia Tbk., Kantor Cabang Utama Gading Serpong, surat kepada Sherly Agustine Nugroho, 18 Juli 2017.

PT Bank Central Asia Tbk. Surat kepada Sherly Agustine Nugroho, 08 Agustus 2017.

PT Bank CIMB Niaga. Surat kepada Sherly Agustine Nugroho, 01 Agustus 2017.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, surat kepada Sherly Agustine Nugroho, 3 Oktober 2017.

Sherly Agustine Nugroho. Surat kepada Pengadilan Pajak, 13 Oktober 2017.

Direktur Jenderal Pajak. Surat kepada Pengadilan Pajak Majelis XIIA, 17 November 2017.

I. WAWANCARA

Dharmawan. Wawancara dengan penulis, Jakarta, 12 April 2019.

Fuady, Munir. Wawancara via telepon dengan penulis, Jakarta, 17 Mei 2019.

Nugroho, Susanti Adi. Wawancara via telepon dengan penulis, Jakarta, 27 Mei 2019.

J. ON-LINE INFORMATION VIA INTERNET

Arizona, Yance. "Apa Itu Kepastian Hukum" (On-line). Tersedia di WWW:

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum.html> (28

April 2019).

- Luthfi, Faizal. “Pengertian Rasio Pajak (Tax Ratio) Pajak secara Lengkap” (On-line). Tersedia di WWW : <https://solusibisnis.co.id/apa-itu-tax-ratio-rasio-pajak.html> (26 April 2019).
- Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Jenis dan Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)” (On-line). Tersedia di WWW : <https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-jenis-dan-perhitungan-produk-domestik-bruto-pdb.html> (26 April 2019).
- Hutasoit, Bolmer. “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch” (On-line). Tersedia di WWW: <https://bolmerhutasoit.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html> (28 April 2019).
- Mogu. “Pengertian Produk Domestik Bruto” (On-line). Tersedia di <http://woocara.com/2017/11/pengertian-produk-domestik-bruto-pdb.html> (28 April 2019).
- Samiun, Ali “Pengertian Pajak dan Jenis Jenis Pajak” (On-Line), tersedia di WWW : <http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html> (28 April 2019).
- Senopati, Giras. “Bank Dunia: Indonesia, Negara dengan Penerimaan Paling Rendah” (On-line). Tersedia di WWW . <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141209060046-78-16831/bank-dunia-indonesia-negara-dengan-penerimaan-paling-rendah.html> (03 Oktober 2018).

Sherpa, “Sejarah Singkat G20” (On-line). Tersedia di WWW :
<http://sherpag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/content&content=sejarah.html> (28 April 2019).

Sugiana, Yodi. “Pengertian Dana Moneter (IMF)” (On-line). Tersedia di WWW :
<https://www.sridianti.com/pengertian-dana-moneter-internasional-imf.html> (26 April 2019).

Widya Ningrum, Novia. “PPN: Pengertian, Tarif, Cara Hitung Pajak Pertambahan Nilai” (On-line). Tersedia di WWW : <https://klikpajak.id/pajak-pertambahan-nilai-ppn.html> (28 April 2019).

K. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.